



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASTI MELANI ASTARI**
2. Jabatan : **WAKIL DEKAN BIDANG UMUM, KEUANGAN DAN SUMBER DAYA**
3. NHK : **854121**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **880.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/60 m2 di KOTA MALANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/200 m2 di KOTA MALANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **79.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI SWIFT 1.5GL Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 140 AL115C/MIO SOUL Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N4GLO A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **60.825.649**

F. HARTA LAINNYA Rp. **43.000.000**

Sub Total Rp. **1.062.825.649**

III. HUTANG Rp. **196.600.826**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **866.224.823**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.